

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dana Desa Tertahan
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.7
Edisi	: Rabu, 30 Mei 2018

Dana Desa Tertahan

■ Total Diterima KBB Rp 193 Miliar

NGAMPRAH, (GM).-

Sejumlah desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih ada yang belum bisa mencairkan dana desa tahap II tahun anggaran 2018. Hal itu lantaran beberapa desa belum memenuhi semua persyaratan.

Seperti diungkapkan Kepala Desa Cilame, Aas Mohammad Asor yang sampai saat ini belum mendapatkan dana desa sejak tahap pertama. Diakuinya, persyaratan yang dipenuhinya belum lengkap.

"Kami masih dalam proses pencairan dana desa tahap 1. Kemarin memang ada kesalahan administrasi. Tapi, revisinya sudah kami kerjakan, mudah-mudahan pencairan bisa pekan ini," kata Aas di Ngamparah, Selasa (29/5).

Diakui Aas, dengan masih belum cairnya dana desa, membuat program yang sudah disusun pemerintah desa menjadi terhambat. Namun demikian, ia optimistis

setelah proses pencairan dilakukan, semua program bisa dilaksanakan dengan baik.

"Kami punya banyak program di desa. Termasuk dana desa ini kami gunakan juga untuk pelatihan kader posyandu," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Wandiana mengungkapkan, total dana desa tahap II tahun anggaran 2018 di KBB sebesar Rp 79.316.544.400 sudah bisa dicairkan.

Ia mengingatkan agar desa bisa segera mencairkan dana desa, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya laporan APBDes serta penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Jika persyaratan belum lengkap, pencairan tidak bisa dilakukan.

"Seperti dana desa tahap I pun, ada 10 desa yang belum bisa mencairkan karena persyaratan belum lengkap. Jadi, harus dilengkapi atau diperbaiki dulu," ujar Wandiana.

ana.

Ia menyebutkan total dana desa tahun ini sebesar Rp 193 miliar. Pada tahap pertama, sudah dicairkan Rp 38,6 miliar, lalu tahap kedua Rp 79 miliar. Pada tahap kedua, dana desa paling banyak diterima Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, yakni Rp 693 juta.

"Sementara itu, terkecil untuk Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar senilai Rp 359 juta," kata Wandiana.

Pemberdayaan

Menurutnya, perbedaan nominal dana desa yang diterima dipengaruhi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah keluarga miskin serta indeks kesulitan geografis. Mengacu pada data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) KBB.

"Peruntukan dana desa ini, yaitu

bagi pemberdayaan dan pembangunan desa, sesuai dengan kebijakan pemerintah desa masing-masing," ujarnya.

Wandiana mengatakan, secara keseluruhan, setiap desa rata-rata mendapatkan keuangan dari berbagai sumber hingga Rp 2 miliar. Selain dana desa, sumber keuangan desa juga diperoleh dari alokasi dana desa (ADD) dan bagi hasil retribusi dan pajak daerah.

Lebih lanjut Wandiana mengungkapkan, saat ini pemerintah desa juga didorong untuk menyelesaikan pembuatan APBDes agar bisa mencairkan dana-dana tersebut. Pihaknya terus memberikan pendampingan bagi setiap pemerintah desa yang membutuhkan bantuan.

"Kebutuhannya apa saja, itu harus tertuang dalam APBDes. Tujuannya, agar dana-dana yang tersalurkan nanti bisa dimanfaatkan dengan tepat," katanya. (amr)**